

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2016
MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN
EKONOMI

BAB IV
PENDAPATAN NASIONAL



Dr. KARDOYO, M.Pd.
AHMAD NURKHIN, S.Pd. M.Si.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2016

BAB IV PENDAPATAN NASIONAL

Kompetensi Inti

1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
2. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.

Kompetensi Dasar

1. Mendiskripsikan tujuan pembangunan ekonomi negara sedang berkembang
2. Disajikan data pendapatan nasional peserta dapat menghitung besarnya pendapatan nasional dengan metode pengeluaran.
3. Disajikan data pendapatan masyarakat di dalam dan di luar negeri, peserta dapat menghitung besarnya GDP.
4. Disajikan sebuah fungsi pendapatan nasional, peserta dapat menentukan besarnya tabungan masyarakat.
5. Menentukan faktor eksternal yang sangat mempengaruhi investasi

A. PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

1. Pengertian

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan dalam pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan menghitung adanya pertumbuhan penduduk disertai adanya perubahan fundamental dalam struktur ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan PDB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk

2. Perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi adalah :

Pertumbuhan Ekonomi	Pembangunan Ekonomi
Merupakan proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang	Merupakan proses perubahan yang terus menerus menuju perbaikan termasuk usaha meningkatkan produk per kapita
Tidak memperhatikan pemerataan pendapatan	Memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
Tidak memperhatikan pertumbuhan penduduk	Memperhatikan pertumbuhan penduduk

Belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat	Meningkatkan taraf hidup masyarakat
Pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi	Pembangunan ekonomi selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi
Setiap input dapat menghasilkan output yang lebih banyak	Setiap input selain menghasilkan output yang lebih banyak juga terjadi perubahan – perubahan kelembagaan dan pengetahuan teknik

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi :

Faktor ekonomi :

- a. Sumber daya manusia
- b. Sumber daya alam
- c. Sumber daya modal
- d. Keahlian atau kewirausahaan teknologi
- e. Distribusi pendapatan

Faktor non ekonomi :

- a. Lembaga-lembaga sosial
- b. Keadaan politik
- c. Institusional

4. Masalah Pembangunan di Negara Sedang Berkembang

- a. Kurangnya Modal dan Rendahnya Kualitas Penduduk
- b. Kepincangan dalam Tingkat Pertumbuhan antara berbagai Sektor Ekonomi
- c. Kepincangan dalam distribusi Pendapatan
- d. Kelemahan Kelembagaan dalam Masyarakat, sifat dan Kebiasaan hidup

5. Tujuan Pembangunan Ekonomi

- a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya
- b. Memperluas distribusi sebagai barang kebutuhan pokok
- c. Memperluas kesempatan kerja
- d. Meningkatkan pendapatan masyarakat
- e. Meningkatkan pemahaman dan tingkah laku masyarakat dalam menjunjung nilai-nilai luhur

- f. Memperluas pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan

6. Kriteria keberhasilan pembangunan ekonomi

a. Pendapatan nasional

Pendapatan nasional yang tinggi merupakan salah satu tanda bahwa produksi nasional yang tinggi berarti tingkat jumlah barang dan jasa yang dihasilkan jumlahnya besar dan tingkat kesempatan kerja tinggi.

b. Pendapatan perkapita

Tinggi rendahnya pendapatan perkapita menggambarkan kemampuan penduduk untuk mengkonsumsi barang dan jasa hasil produksi.

c. Distribusi pendapatan

Distribusi pendapatan menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat merata.

d. Peranan sektor industri dan jasa

Makin besar kontribusi sektor industri dan jasa maka makin maju negara tersebut.

e. Kesempatan kerja

Kesempatan kerja yang tinggi menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dan menunjukkan juga berkurangnya tingkat pengangguran.

f. Stabilitas ekonomi

Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika dapat menjaga stabilitas ekonomi.

g. Neraca pembayaran luar negeri

Pada umumnya negara menginginkan neraca pembayaran yang seimbang.

7. Rumus laju pertumbuhan ekonomi

$$\frac{GDP_t - GDP_{t-1}}{GDP_{t-1}} \times 100\%$$

$$\frac{\Delta PDB_t}{PDB_{t0}} \times 100\%$$

Keterangan:

ΔPDB_t = $PDB_t - PDB_{t0}$
 PDB_t = nilai PDB tahun t
 PDB_{t0} = nilai PDB tahun dasar yang umumnya adalah nilai PDB tahun sebelumnya

Diketahui PDB tahun 2002 senilai Rp 45.000 miliar dan PDB tahun 2003 senilai Rp 50.000 miliar. Berapa pertumbuhan ekonomi tahun 2003

Jawab:

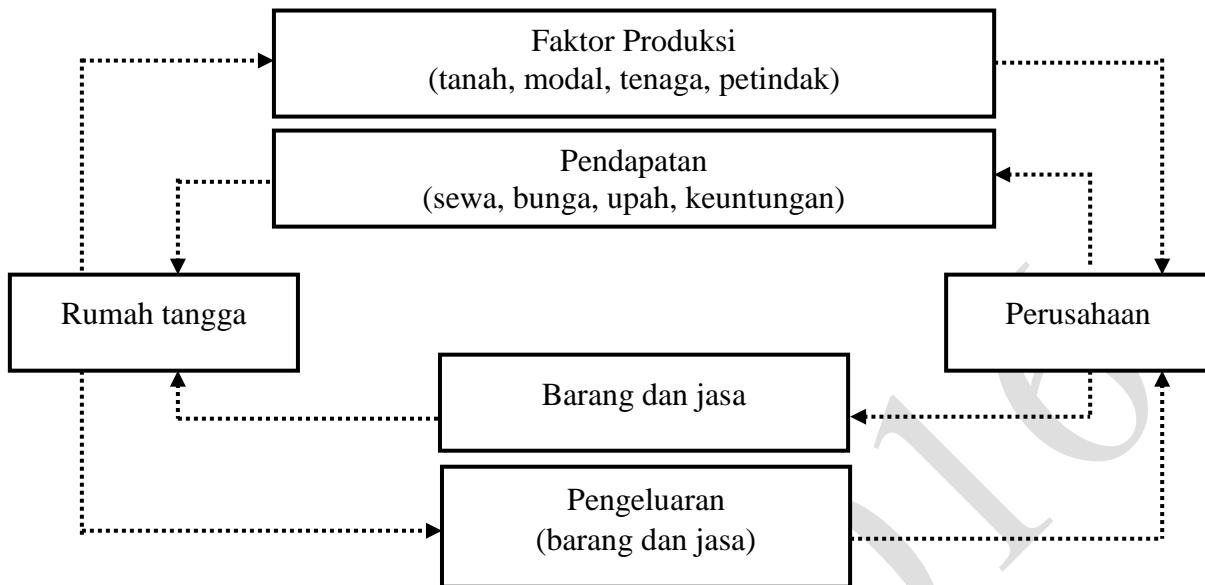
$$\frac{\Delta PDB_t}{PDB_{t0}} \times 100\%$$
$$\frac{50.000 \text{ miliar} - 45.000 \text{ miliar}}{45.000 \text{ miliar}} \times 100\%$$
$$\frac{5000}{45000} = 11,2\%$$

B. PDB (Produk Domestik Bruto), PNB (Produk Nasional Bruto), PN (Pendapatan Nasional), Pendapatan Disposibel dan Pendapatan Perkapita

Sebagai gambaran keterkaitan antar sektor ekonomi dalam proses produksi kita ambil contoh perekonomian dua sektor, yaitu perekonomian yang hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, seperti bagan sebagai berikut:

Gambar di bawah terdapat beberapa aliran / arus yaitu: 1) **arus produksi**, 2) **arus pendapatan** dan 3) **arus pengeluaran**. Jika kegiatan perekonomian untuk seluruh negara maka ukuran tersebut menjadi ukuran nasional (makro). Dengan demikian pendapatan nasional dapat ditinjau dari tiga pendekatan tersebut.

Bagan Alir Model Perekonomian Dua Sektor



Definisi Pendapatan Nasional

1. Pendekatan Produksi

Ditinjau dari pendekatan produksi, pendapatan nasional adalah jumlah nilai dari barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu, biasanya satu tahun dinyatakan dalam satuan mata uang.

2. Pendekatan Pendapatan

Ditinjau dari pendekatan pendapatan, pendapatan nasional adalah jumlah semua pendapatan yang diperoleh pelaku ekonomi suatu negara selama periode tertentu, biasanya satu tahun. Pendapatan tersebut berupa pendapatan dari sewa, bunga, upah, keuntungan dan lain-lain, dinyatakan dalam satuan mata uang.

3. Pendekatan Pengeluaran

Ditinjau dari pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pengeluaran sektor ekonomi, yakni sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri suatu negara selama periode tertentu, biasanya satu tahun.

Beberapa istilah dalam pendapatan nasional

Istilah-istilah yang sering digunakan untuk mengetahui berapa besarnya barang dan jasa yang telah dihasilkan oleh suatu perekonomian pada periode tertentu dan berapa besarnya pendapatan yang diterima seluruh masyarakat sebagai pemilik faktor-faktor produksi adalah istilah-istilah sebagai berikut:

1. PDB (Produk Domestik Bruto) atau GDP (Gross Domestic Product)

PDB (Produk Domestik Bruto), adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di wilayah tertentu (tanpa memperhatikan kewarganegaraan) selama 1 tahun. Termasuk jasa dari perusahaan asing yang beroperasi di negara tersebut juga dijumlahkan. Komposisi GDP terdiri dari:

- a. sektor primer (pertanian, perikanan dan pertambangan).
- b. sektor sekunder (manufaktur, listrik, gas, air, dan konstruksi)
- c. sektor tersier (perdagangan, perbankan, jasa)

Sebenarnya perhitungan pendapatan nasional yang menghasilkan besarnya Produk Domestik Bruto (PNB) atau Gross Domestic Product (GDP) adalah menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan konsep “**kewilayahan**” yaitu menghitung jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh penduduk yang ada di wilayah tersebut, baik kegiatan produksi oleh warga negara sendiri maupun warga negara asing.

2. PNB (Produk Nasional Bruto) atau GNP (Gross National Product)

PNB (Produk Nasional Bruto) atau GNP (Gross National Product), adalah perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan konsep “**kewarganegaraan**”, yaitu dengan menghitung besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara sendiri, baik di dalam negeri sendiri maupun di luar negeri.

Yang membedakan antara GDP dengan GNP adalah pendapatan neto terhadap luar negeri dari faktor produksi (*net factors income from abroad*). Variabel ini menunjukkan besarnya pendapatan yang diperoleh dari faktor produksi yang ada di luar negeri dikurangi pendapatan yang diperoleh dari faktor produksi yang berasal dari di luar negeri di dalam negeri. Atau dapat ditulis :

$$\text{GNP} = \text{GDP} - \text{Pendapatan neto terhadap luar negeri dari faktor produksi.}$$

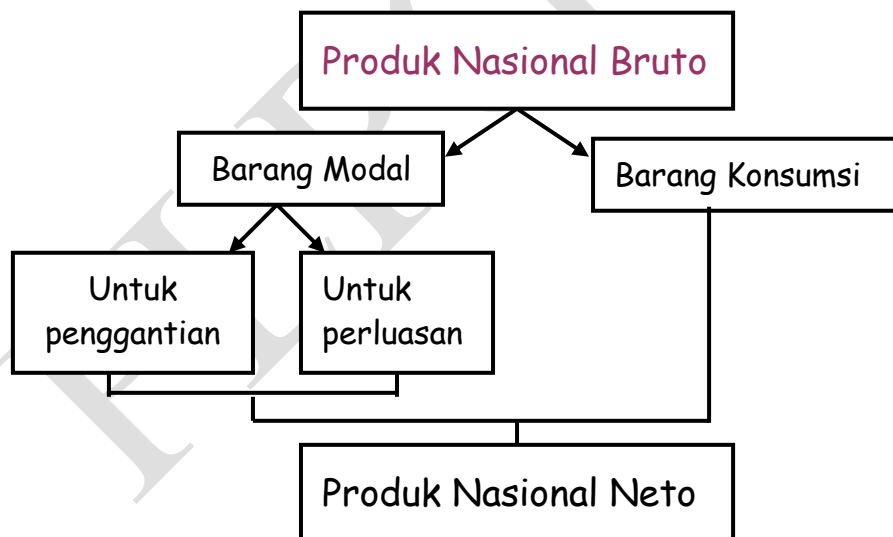
Dengan memperhatikan persamaan tersebut, apabila GDP lebih besar dari pada GNP, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan dari faktor produksi di dalam negeri yang berasal dari luar negeri lebih besar dibandingkan dengan pendapatan dari faktor produksi dalam negeri yang ada di luar negeri. Keadaan semacam ini biasanya sering ditemui di negara sedang berkembang.

3. PNN (Produk Nasional Neto) atau NNP (Net National Product)

Produk nasional neto adalah produk nasional bruto (PNB) atau GNP dikurangi dengan penyusutan dan replacement (penggantian peralatan yang telah aus/usang atau biaya pengganti barang modal). Dengan demikian Produk Nasional Neto dapat ditulis :

$$\text{NNP} = \text{GNP} - (\text{penyusutan} + \text{replacement})$$

PNN (Produk Nasional Neto) dapat dibuat skema sebagai berikut:



4. PN (Pendapatan Nasional) atau National Income (NI)

Pendapatan nasional adalah jumlah nilai balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi selama satu tahun. Buruh menerima upah, pemilik modal menerima bunga modal, pemilik tanah/rumah menerima sewa tanah dan pengusaha menerima

laba. Jika pendapatan nasional ditambah dengan pajak tak langsung maka nilai sama dengan NNP, sehingga dapat ditulis:

$$NI = NNP - \text{pajak tak langsung}$$

5. Pendapatan Perseorangan (PS) atau Personal Income (PI)

Pendapatan Perseorangan (PS) atau Personal Income (PI) adalah jumlah penerimaan yang diperoleh setiap orang dalam masyarakat.

Balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi tidak seluruhnya merupakan pendapatan perseorangan, karena masih ada sebagian laba yang ditahan sebagai simpanan intern, pajak perseorangan, dan iuran untuk jaminan sosial. Di samping itu terdapat penerimaan yang tidak merupakan balas jasa dalam proses produksi, tetapi merupakan bantuan/subsidi dari pemerintah bagi para bekas pejuang, dana sosial yang disediakan oleh pemerintah yang disebut dengan *transfer payment*. Jika ditulis dalam notasi sebagai berikut:

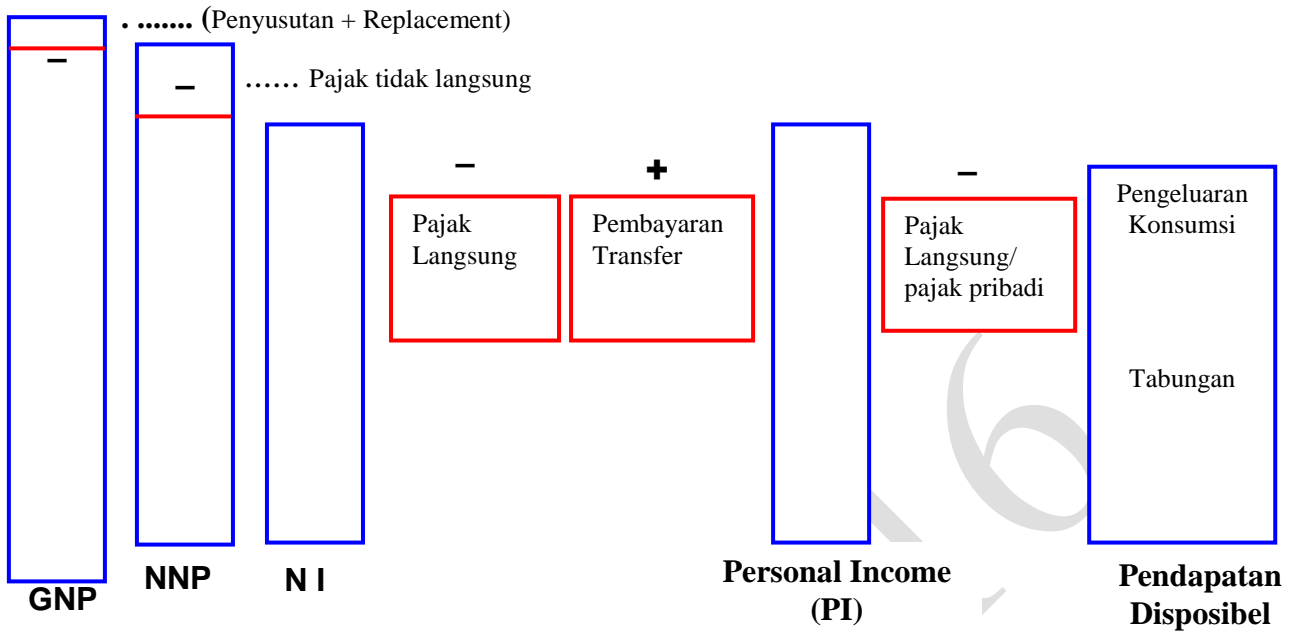
$$PI = NI - (\text{laba yang ditahan, pajak langsung, iuran jaminan sosial}) + \text{transfer payment}$$

6. Pendapatan Disposibel atau Disposable Income (DI)

Pendapatan Disposibel disebut juga pendapatan yang tersedia bagi rumah tangga atau pendapatan yang dapat dibelanjakan, yaitu penerimaan perseorangan setelah dikurangi dengan pajak langsung (misalnya pajak pendapatan, pajak bumi dan bangunan, pajak rumah tangga dan lain-lain). Jika pendapatan disposibel ini dikurangi dengan tabungan (*saving*) maka sisanya merupakan pengeluaran untuk konsumsi. Jika ditulis dalam notasi :

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan perseorangan} - \text{pajak langsung} &= \text{pendapatan disposibel (D.I)} \\ \text{D.I} - \text{simpanan perseorangan/tabungan (saving)} &= \text{pengeluaran konsumsi} \end{aligned}$$

Secara ringkas istilah dalam pendapatan nasional dapat dinotasikan sebagai berikut:



7. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan perkapita adalah hasil bagi pendapatan nasional dan jumlah penduduk suatu negara, jika ditulis dalam notasi sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan per kapita} = \frac{\text{Pendapatan Nasional}}{\text{Jumlah penduduk suatu negara}}$$

Pendapatan per kapita merupakan ukuran internasional yang biasanya dipakai untuk menentukan tingkat kemakmuran suatu negara.

1. GDP	Rp	
2. Produk neto thd LN	Rp	(-)
3. GNP	Rp	
4. Penyusutan	Rp	(-)
5. NNP	Rp	
6. Pajak tdk langs	Rp	(-)
7. NNI	Rp	
8. IA	Rp	
9. IJS	Rp	
10. PPers	Rp	
11. Laba thn	Rp	(+)
	Rp	(-)
12. Transfer payment	Rp	(+)
13. PI	Rp	
14. Pajak langsung	Rp	(-)
15. DI	Rp	
16. Tabungan	Rp	

17. Tingkat konsumsi

Rp

Di tingkat provinsi ada istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di wilayah tertentu yaitu Provinsi atau Kabupaten / Kota selama 1 tahun. Sehingga ada sebutan PDRB provinsi misalnya PDRB Jawa Tengah, PDRB DKI Jakarta, PDRB DI Yogyakarta, PDRB Sumatera Utara, PDRB Sulawesi Selatan dan sebagainya. Sedangkan untuk kabupaten/kota misalnya PDRB Kota Bekasi, Surakarta, Medan, dan sebagainya.

Komposisi PDRB terdiri dari:

- a. sektor primer (pertanian, perikanan dan pertambangan/penggalan).
- b. sektor sekunder (manufaktur, listrik, gas, air, dan konstruksi)
- c. sektor tersier (perdagangan, perbankan, perhotelan dan jasa)

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tingkat provinsi adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh penduduk yang ada di wilayah tersebut, baik kegiatan produksi oleh warga negara sendiri maupun warga negara asing.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan cerminan kemampuan suatu daerah tertentu dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sebagai bahan perencanaan pembangunan. Salah satu indikator yang dipergunakan dengan mengacu hasil analisis pendapatan daerah, sehingga PDRB dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Istilah-istilah lain yang ada kaitannya dengan pembahasan pendapatan nasional:

- *Value Added* (nilai tambah), adalah tambahan nilai dari suatu barang dan jasa yang diperoleh dari suatu proses produksi. Atau dengan kata lain nilai tambah adalah nilai produksi barang akhir dikurangi bahan mentah dan bahan penolong lainnya yang digunakan dalam proses produksi.
- *Injection* adalah suntikan atau tambahan aliran uang (dana) dalam satu sistem perekonomian, yang sifat mendorong kegiatan ekonomi supaya bergerak lebih cepat. Suntikan dapat berupa : investasi, pengeluaran pemerintah atau pajak neto.

- *Net Factor Income from Abroad* adalah selisih antara nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara sendiri di negara asing dan nilai dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing di dalam negeri.

Metode Perhitungan Pendapatan Nasional

Ada 3 Metode atau pendekatan untuk menghitung pendapatan nasional, yaitu :

1. Metode Produksi (*Production Approach*)
2. Metode Pendapatan (*Income Approach*)
3. Metode Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Menghitung besarnya Pendapatan Nasional dengan menggunakan ketiga metode atau pendekatan tersebut secara teoritis akan menghasilkan besarnya angka sama.

1. Metode Produksi (*Production Approach*)

Perhitungan pendapatan nasional dengan metode produksi adalah perhitungan didasarkan pada jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan negara pada periode tertentu (biasanya 1 tahun). Dalam perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan metode produksi dimungkinkan terjadi perhitungan ganda (*double counting*). Untuk menghindari perhitungan ganda tersebut ada dua cara yang digunakan, yaitu:

1. Menghitung nilai akhir dan/atau
2. Menghitung nilai tambah, ialah nilai yang berasal dari sumbangan faktor-faktor produksi yaitu tenaga kerja, modal, tanah dan petindak.

Dengan ke dua cara perhitungan tersebut di atas akan menghasilkan angka yang sama, perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan metode produksi dapat kita lihat pada contoh sebagai berikut:

Contoh:

	Hasil	Nilai (Milyar Rp)	Nilai Tambah (Milyar Rp)
Produsen I	Kapas	150	150
Produsen II	Benang	400	250
Produsen III	Kain	750	350

Produsen IV	Pakaian Jadi	1250	500
Jumlah Nilai Tambah		1250	1250

Berdasarkan contoh kegiatan produksi di atas menunjukkan perhitungan terhadap nilai barang akhir dengan menjumlahkan nilai tambah menghasilkan angka yang sama, yaitu sebesar 1250 juta. Angka yang diperoleh sebesar 1250 juta ini menunjukkan besarnya produksi yang diperoleh dari beberapa proses produksi dari perekonomian masyarakat tersebut.

2. Metode Pendapatan (*Income Approach*)

Perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendapatan adalah menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan semua pendapatan yang diperoleh oleh semua pelaku ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara selama 1 tahun. Pendapatan tersebut berupa pendapatan dari sewa, bunga, upah keuntungan, dan lain-lain. Angka yang diperoleh dari perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendapatan menunjukkan besarnya pendapatan nasional (National Income = NI).

Perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendapatan (dalam milyar rupiah) kita ambil contoh sebagai berikut:

Kompensasi kepada pegawai.....	2.959
Bunga dan sewa.....	921
Laba Perusahaan	882
Pendapatan dari kekayaan	986
Jumlah	: 5.748

Jumlah pendapatan yang diperoleh menunjukkan besarnya pendapatan nasional (NI), yaitu sebesar 5.748 milyar.

3. Metode Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan metode pengeluaran yaitu dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran sektor ekonomi, yakni sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri pada masyarakat atau negara selama 1 tahun.

Angka yang diperoleh dalam dari perhitungan pendapatan nasional dengan metode pengeluaran menunjukkan besarnya Produksi Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP) masyarakat dalam perekonomian tersebut.

Contoh perhitungan pendapatan nasional dengan metode pengeluaran (dalam milyar rupiah) :

Pengeluaran Konsumsi (Rumah tangga) atau C	2.767
Investasi (Perusahaan) atau I	1002
Pengeluaran Pemerintah (Pemerintah) atau G	1038
Ekspor Neto (Luar negeri) atau X – M	425
	<hr/>
Jumlah Pengeluaran :	5.232

Angka yang diperoleh dari menjumlahkan semua pengeluaran sektor ekonomi di atas, yaitu sebesar **5.232** menunjukkan besarnya Produksi Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP) masyarakat dalam perekonomian tersebut.

Pengeluaran Konsumsi (sektor rumah tangga) diberi simbol (C), Investasi merupakan pengeluaran dari sektor perusahaan diberi simbol (I), pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran dari pemerintah (Government) diberi simbol (G) dan ekspor neto menunjukkan pengeluaran sektor luar negeri berupa selisih antara Ekspor (X) dan Impor (M) sehingga sektor luar negeri simbolnya (X – M). Dengan demikian pendapatan nasional yang terdiri dari komponen-komponen pengeluaran dari sektor-sektor tersebut secara matematis dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :

$$\text{GNP} = C + I + G + (X - M)$$

Dimana: C adalah pengeluaran sektor rumah tangga

I adalah pengeluaran sektor perusahaan
G adalah pengeluaran sektor pemerintah
(X – M) adalah sektor luar negeri atau ekspor neto

Dari persamaan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP) di atas tidak terlihat adanya pendapatan neto terhadap luar negeri atas faktor-faktor produksi (net factor income to abroad). Apabila komponen ini hendak kita masukan dalam persamaan, maka persamaan matematisnya sebagai berikut:

$$\text{GNP} = C + I + G + (X - M) + F$$

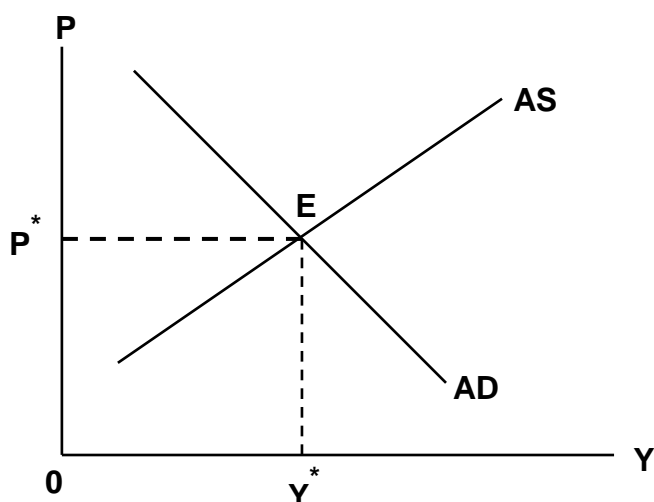
dimana: **F** adalah pendapatan neto terhadap luar negeri atas faktor produksi atau pembayaran ke luar negeri dikurangi pembayaran dari luar negeri. Unsur F ini menyatakan adanya investasi asing di dalam negeri pada perekonomian negara tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Nasional

1. Permintaan dan Penawaran Agregat

Permintaan agregat (Aggregate Demand, selanjutnya disingkat AD) adalah keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa pada berbagai tingkat harga konsumen.

Penawaran agregat (Aggregate Supply, selanjutnya disingkat AS) adalah keseluruhan penawaran barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Dengan mengetahui kurva permintaan agregat dan penawaran agregat kita dapat menentukan pendapatan nasional riil dan tingkat-tingkat harga umum. Pendapatan nasional riil adalah hasil bagi antara pendapatan nasional dengan harga rata-rata seluruh barang yang diproduksi di negara yang bersangkutan. Keseimbangan pendapatan nasional riil dan tingkat harga rata-rata suatu perekonomian ditentukan oleh perpotongan kurva permintaan agregat (AD) dan kurva penawaran agregat (AS), seperti terlihat pada Gambar berikut:



Keterangan Gambar :

Y = garis pendapatan nasional riil

P = tingkat harga rata-rata umum

E = keimbangan pendapatan nasional

Y^* = pendapatan nasional riil pada equilibrium/keseimbangan.

P^* = harga rata-rata umum pada equilibrium/keseimbangan.

AD = kurva permintaan agregat

AS = kurva penawaran agregat

2. Konsumsi dan Tabungan

Konsumsi adalah bagian pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membeli barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Bagi masyarakat yang berpenghasilan kecil/rendah keseluruhan pendapatannya akan habis dipergunakan untuk keperluan konsumsi, biasanya dilambangkan dengan notasi $Y = C$. Untuk konsumsi dikenal adanya istilah marginal propensity to consume (MPC) yaitu kecenderungan masyarakat untuk berkonsumsi. Konsumsi seorang akan dipengaruhi oleh faktor-faktor :

- a. Pendapatan seseorang atau tingkat kekayaannya
- b. Tingkat sosial ekonomi orang tersebut
- c. Tingkat harga yang berlaku dan harga barang lain/ barang substitusi
- d. Selera konsumen.
- e. Tingkat suku bunga yang berlaku

Tabungan (*saving*) adalah bagian pendapatan masyarakat yang tidak digunakan untuk konsumsi. Masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih besar dari kebutuhan konsumsi, maka masyarakat tersebut mempunyai kesempatan untuk menabung.

Perubahan tabungan dalam masyarakat bisa terjadi karena dua hal yaitu :

1. Berubahnya pendapatan masyarakat
2. Berubahnya pola hidup masyarakat

Tabungan dalam kaitannya dengan pendapatan nasional dapat dinotasikan $Y = C + S$.

Jika pendapatan nasional naik sebesar $\Delta(\text{delta})Y$, maka tabungan akan naik sebesar ΔS . Kalau untuk konsumsi dikenal adanya istilah **marginal propensity to consume**

(MPC), maka dalam tabungan dikenal istilah *marginal propensity to save* (MPS), yaitu kecenderungan menabung yang merupakan rasio antara tambahan dalam tabungan (ΔS) dengan tambahan dalam pendapatan (ΔY), atau di notasikan sebagai berikut:

$$MPS = \frac{\Delta S}{\Delta Y}$$

Karena $Y = C + S$, berdasarkan dengan demikian kita dapat melihat hubungan antara MPC dan MPS sebagai berikut:

$$MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y} = \frac{\Delta Y - \Delta S}{\Delta Y} = 1 - \frac{\Delta S}{\Delta Y} = 1 - MPS, \text{ atau } MPC + MPS = 1$$

3. Investasi

Investasi ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi riil dan investasi finansial. Investasi riil adalah investasi terhadap barang-barang yang tahan lama (barang-barang modal) yang akan digunakan untuk proses produksi. Jenis investasi ini dibedakan lagi menjadi 3 komponen, yaitu:

- a. Investasi tetap perusahaan
- b. Investasi untuk perumahan
- c. Investasi perubahan bersih persediaan perusahaan

Sedangkan investasi finansial merupakan investasi terhadap surat-surat berharga, misalnya pembelian saham, obligasi atau sertifikat BI.

Investasi riil dan investasi finansial yang meningkat akan meningkatkan pendapatan nasional, demikian juga sebaliknya jika investasi tersebut menurun maka pendapatan nasional akan turun juga. Dalam investasi ada yang disebut dengan *ekspektasi masa depan*, artinya tingkat harapan dan kepercayaan dalam dunia bisnis/usaha. Jika kalangan pengusaha beranggapan bahwa kondisi ekonomi akan membaik di masa depan, maka investasi cenderung meningkat. Sebaliknya, jika diperkirakan ekonomi akan mengalami depresi, maka investasi tidak akan dilakukan.

Faktor utama yang menentukan tingkat investasi adalah tingkat suku bunga, tetapi ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi tingkat investasi, yaitu :

- 1) Inovasi dan teknologi
- 2) Tingkat perekonomian

- 3) Ramalan atau harapan perekonomian di masa datang
- 4) Tingkat keuntungan perusahaan
- 5) Situasi politik negara, jika situasi politik aman, dan pemerintah banyak memberikan kemudahan-kemudahan bagi dunia usaha dan industri, tingkat investasi akan tinggi. Tetapi jika situasi politik tidak aman, dan pengusaha menghadapi birokrasi berbelit-belit, tingkat investasi akan turun.

Manfaat Perhitungan Pendapatan Nasional

Perhitungan Pendapatan Nasional suatu negara perlu dipelajari, karena mempunyai tujuan untuk:

- 1.) Mengetahui Tingkat Kemakmuran
- 2.) Mengetahui Struktur Perekonomian
- 3.) Mengetahui Tingkat Pertumbuhan
- 4.) Mengetahui Perbandingan Kemajuan Perekonomian Antarnegara
- 5.) Dasar Pertimbangan dalam Pengambilan Kebijakan Ekonomi

Manfaat Mempelajari Pendapatan Nasional

- 1.) Mengetahui Kemajuan Ekonomi
- 2.) Mengetahui Tingkat Kemakmuran
- 3.) Sebagai Pedoman Pelaksanaan Pembangunan
- 4.) Mengetahui Penggunaan Pendapatan Masyarakat

C. Arti, Fungsi dan Tujuan APBN dan APBD

1. Pengertian APBN

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah suatu daftar sistematis yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun.

Seperti disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui APBN yang

diusulkan oleh pemerintah maka pemerintah memakai pelaksanaan APBN tahun lalu.

2. Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pembagian daerah berdasarkan pemerintahan daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 adalah:

- a. Daerah Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur
- b. Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Bupati/Walikota

Dari pembagian daerah di atas berarti APBD di tingkat provinsi ditetapkan bersama antara Gubernur dengan DPRD I.

APBD ditingkat Kabupaten/Kota ditetapkan bersama antara Bupati/Walikota dengan DPRD II.

APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan APBN.

3. Fungsi dan Tujuan APBN dan APBD

APBN disusun dengan tujuan untuk mengatur pembelanjaan negara dari penerimaan yang direncanakan supaya dapat mencapai sasaran yang ditetapkan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan fungsi APBN dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Fungsi alokasi
 - 1) Sebagai alat untuk mengetahui alokasi yang diperlukan masing-masing sektor pembangunan.
 - 2) Sebagai alat untuk mengetahui sasaran dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah.
- b. Fungsi stabilisasi
 - 1) Sebagai pedoman penerimaan dan pembelanjaan negara supaya teratur.
 - 2) Sebagai alat untuk menjaga stabilitas perekonomian.
 - 3) Sebagai alat untuk mencegah terjadinya inflasi dan deflasi yang tinggi.
- c. Fungsi regulasi
 - 1) Sebagai alat pendorong pertumbuhan ekonomi.

2) Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

d. Fungsi distribusi

1) Dari penerimaan-penerimaan sebagai pendapatan negara didistribusikan ke pos-pos pengeluaran yang sudah direncanakan.

2) Sebagai alat untuk pemerataan pengeluaran supaya tidak terpusat pada salah satu sektor saja.

Sedangkan APBD disusun bertujuan untuk mengatur pembelanjaan daerah dari penerimaan daerah yang direncanakan.

Adapun fungsi APBD seperti fungsi APBN. Lingkup wilayahnya hanya mencakup pada satu daerah yaitu daerah tingkat I atau daerah tingkat II.

4. Sumber-sumber Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah

a. Sumber Pendapatan Negara dan Belanja Negara

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Dengan pemberian Otonomi Daerah tersebut, maka struktur dan format APBN juga mengalami perubahan.

Sumber-Sumber Pendapatan

Dari berbagai jenis pendapatan negara dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Penerimaan perpajakan

a) Pajak Dalam Negeri: i) Pajak Penghasilan; ii) Pajak Pertambahan Nilai; iii) Pajak Bumi dan Bangunan; iv) Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan; (v) Cukai; dan (vi) Pajak lain.

b) Pajak Perdagangan Internasional: i) Bea Masuk; dan ii) Pajak/ Pungutan Ekspor.

2) Penerimaan bukan pajak

a) Penerimaan SDA: a) minyak bumi; b) gas alam; c) pertambangan umum; d) kehutanan; e) perikanan

b) Bagian laba BUMN.

c) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

- 3) Hibah adalah pemberian dari masyarakat atau negara donatur yang tidak mengikat.

Pembelanjaan Negara

Pembelanjaan negara dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

- a. Pengeluaran Rutin
 - 1) Belanja Pegawai
 - 2) Belanja Barang
 - 3) Pembayaran Bunga Utang
 - Utang Dalam Negeri
 - Utang Luar Negeri
 - 4) Subsidi
 - Subsidi BBM
 - Subsidi Non BBM
 - 5) Pengeluaran rutin lainnya
- b. Pengeluaran Pembangunan
 - 1) Pembiayaan Pembangunan Rupiah
 - 2) Pembiayaan Proyek

Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni:
 - 1) hasil pajak daerah
 - 2) hasil retribusi daerah
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - 4) lain-lain PAD yang sah
- b. Dana Perimbangan, dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Dana Perimbangan

- a. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam yang dibagi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN, berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk:

- 1) mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah pusat atas dasar prioritas nasional
- 2) mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

5. Sumber Pendapatan dan Belanja Daerah

Penyelenggaraan tugas daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan untuk penyelenggaraan roda pemerintah daerah dapat berasal dari:

- a. APBN
- b. APBD

Sumber Pendapatan dan Belanja Negara sudah dibahas di depan. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- 1) Hasil Pajak Daerah
- 2) Hasil Retribusi Daerah
- 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman Daerah
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Belanja Daerah

Dari sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, antara lain:

a. Untuk Aparatur Daerah

Dapat berupa:

- 1) Belanja Administrasi dan Umum
- 2) Belanja Operasi dan Pemeliharaan
- 3) Belanja Modal

b. Pelayanan Publik

- 1) Belanja Administrasi dan Umum
- 2) Belanja Operasi dan Pemeliharaan
- 3) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
- 4) Belanja Tidak Tersangka

6. Pengaruh APBN dan APBD terhadap Perekonomian

1. Pengaruh APBN terhadap perekonomian

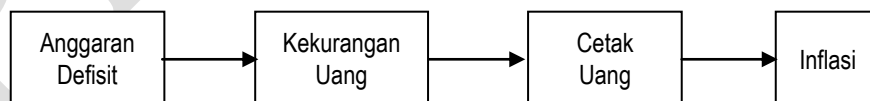
Disusunnya APBN akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara.

Beberapa pengaruh dapat dilihat dari beberapa aspek yakni:

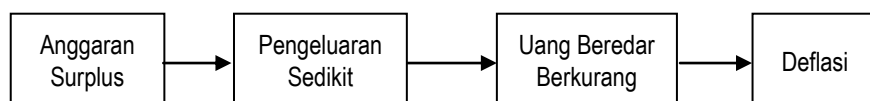
a. Aspek asas penyusunan APBN

Dari aspek penyusunan akan dapat berpengaruh terhadap perekonomian yaitu:

1) Inflasi



2) Deflasi



b. Aspek prioritas

Dari prioritas yang ditekankan dalam APBN akan tampak berpengaruh pada kegiatan perekonomian, antara lain:

1) Pertanian

Akan menunjukkan pada peningkatan di bidang pertanian.

2) Industri

Prioritas bidang industri akan meningkatkan kegiatan industri.

3) Sarana dan prasarana

Prioritas bidang sarana dan prasarana tampak dari para investor menginvestasikan modalnya untuk pembangunan sarana dan prasarana.

Secara umum, pengaruh APBN terhadap perekonomian adalah:

- a. Meningkatkan hasil produksi.
- b. Meningkatkan kesempatan kerja.
- c. Meningkatkan kemakmuran rakyat.
- d. Menciptakan pemerataan pendapatan.

Pengaruh positif, antara lain:

- a. Terjadi perubahan struktur ekonomi.
- b. Peningkatan hasil produksi.
- c. Peningkatan kesempatan kerja.
- d. Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- e. Menciptakan pemerataan pendapatan.

Pengaruh negatif, antara lain:

- a. Dapat terjadi inflasi atau deflasi.
- b. Dari perubahan struktur ekonomi dapat mengganggu ketenangan masyarakat, misalnya perubahan dari agraris ke industri dapat menimbulkan:
 - 1) polusi/pencemaran
 - 2) banyak tanah tergusur
 - 3) kerusakan lingkungan

7. Pengaruh APBD terhadap perekonomian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sebagai pedoman pembiayaan dari penerimaan yang diperoleh. Dalam pembiayaan tersebut akan sangat

berpengaruh pada perekonomian di daerah yang bersangkutan. Setiap terjadi perkembangan suatu daerah mesti terjadi perubahan sosial yang dapat berpengaruh positif dan dapat pula berpengaruh negatif.

Pengaruh positif, antara lain:

- a. Akan terjadi perkembangan dan pembangunan daerah.
- b. Penyelenggaraan pembangunan daerah melibatkan partisipasi masyarakat dan swasta.

Dampak positifnya, antara lain:

- 1) pemerataan pendapatan masyarakat;
- 2) memperluas kesempatan kerja.

Pengaruh negatif, antara lain:

Disamping pengaruh positif, juga terdapat pengaruh negatif, antara lain:

- a. Banyak lahan pertanian yang tergesur oleh pembangunan sehingga mengurangi lahan pertanian.
- b. Dengan semakin majunya suatu daerah, maka biaya hidup menjadi tinggi, sehingga upah tenaga kerja tinggi dan harga barang akan tinggi.
- c. Orang yang kurang mampu akan tergesur dari pusat perekonomian dan harus berada di daerah pinggiran.

8. Kebijakan Anggaran

APBN disusun untuk pembiayaan pembangunan yang berlangsung terus-menerus. Pembiayaan harus menggunakan skala prioritas yang sesuai dengan rencana penerimaan, kemampuan, dan kebutuhan. Untuk menentukannya diperlukan suatu kebijakan anggaran.

Yang dimaksud dengan kebijakan anggaran adalah suatu kebijakan yang mengatur APBN supaya dapat tercapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja dan kemakmuran masyarakat.

Macam-macam Kebijakan Anggaran

Ada empat macam kebijakan penyusunan anggaran:

No	Macam Kebijakan Anggaran	Keterangan (Uraian)
----	--------------------------	---------------------

1	Anggaran Seimbang	Penerimaan Negara = Pengeluaran Negara - Dianut Indonesia sebelum tahun 2000
2	Anggaran Dinamis	Jumlah penerimaan diusahakan meningkat dari tahun ke tahun melalui tabungan pemerintah.
3	Anggaran Defisit	Penerimaan Negara < Pengeluaran Negara - Mulai tahun 2000 Indonesia menganut anggaran defisit
4	Anggaran Surplus	Penerimaan Negara > Pengeluaran Negara

INDEKS HARGA

Angka indeks adalah angka yang diharapkan dapat memberitahukan perubahan-perubahan variable sebuah atau lebih karakteristik pada waktu dan tempat yang sama ataupun berlainan.

Ada 3 macam indeks yang diperlukan dalam bidang ekonomi yaitu indeks harga, indeks jumlah, dan indeks nilai

1. Indeks harga adalah angka yang diharapkan dapat dipakai untuk memperlihatkan perubahan mengenai harga-harga barang, baik harga untuk semacam maupun berbagai macam barang dalam waktu dan tempat yang sama ataupun berlainan.
2. Indeks jumlah adalah angka yang diharapkan dapat memperlihatkan perubahan mengenai jumlah barang sejenis atau sekumpulan barang yang dihasilkan, digunakan, diekspor, dan dijual untuk waktu yang sama ataupun yang berlainan.
3. Indeks nilai adalah angka yang digunakan untuk mengetahui perubahan nilai barang yang sejenis atau sekumpulan barang dalam jangka waktu yang diketahui.

$$\text{Indeks harga } I_{0/n} = \frac{P_n}{P_0} \times 100$$

$$\text{Indeks jumlah } I_{0/n} = \frac{Q_n}{Q_0} \times 100$$

$$\text{Indeks nilai } I_{0/n} = \frac{V_n}{V_0} \times 100$$

V_0

P_0 = harga barang pada tahun atau waktu dasar

P_a = harga barang pada tahun yang lain atau tahun diketahui

Q_0 = jumlah barang pada tahun dasar

Q_a = jumlah barang pada tahun diketahui

V_0 = nilai barang pada tahun dasar

V_a = nilai barang pada tahun diketahui

Indeks ditimbang

Menghitung indeks harga seperti tersebut di atas merupakan contoh perhitungan indeks harga sederhana, artinya belum memasukkan unsur timbangan (weight) ke dalam harga-harga yang dipakai untuk menghitung indeks yang menunjukkan tingkat pentingnya barang yang dihitung indeksnya.

Ada beberapa cara untuk menghitung indeks harga ditimbang, antara lain sebagai berikut:

1. Indeks Laspeyres (Laspeyres Index) adalah indeks yang dihitung dengan menggunakan kuantitas pada tahun dasar sebagai timbangannya

Rumusnya sebagai berikut :

$$I(L) = \frac{\sum P_n \cdot Q_0}{\sum P_0 \cdot Q_0} \times 100$$

2. Indeks Paasche (Paasche Index) adalah indeks yang dalam perhitungannya menggunakan kuantitas pada tahun ke-n atau tahun yang dicari indeksnya sebagai weight. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum P_n \cdot Q_n}{\sum P_0 \cdot Q_n} \times 100$$

3. Indeks Irving Fisher (Irving Fisher Index)

$$I(IF) = \sqrt{\left[\frac{\sum P_n \cdot Q_n}{\sum P_0 \cdot Q_n} \times \frac{\sum P_n \cdot Q_0}{\sum P_0 \cdot Q_0} \right]} \times 100$$

Peranan Indeks Harga dalam Ekonomi

1. indeks harga merupakan petunjuk atau barometer kondisi ekonomi umum
2. indeks harga dapat digunakan sebagai deflator

3. indeks harga dapat digunakan sebagai pedoman bagi pembelian barang

Persoalan Penting yang Perlu diperhatikan dalam Penyusunan (Perhitungan Angka Indeks

1. Perumusan tentang tujuan penyusunan angka indeks
2. Sumber dan syarat perbandingan data
3. Pemilihan periode dasar
4. Pemilihan timbangan

Referensi

Sukirno, Sadono. 2007. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Prenada Media.

Sukirno, Sadono. 2004. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.